

GERAKAN POLITIK KOTAK KOSONG SEBAGAI OPOSISI DINASTI POLITIK MULYADI JAYABAYA PADA PILKADA ITI OCTAVIA JAYABAYA-ADE SUMARDI

EMPTY BOX POLITICAL MOVEMENT AS OPPOSITION TO MULYADI JAYABAYA'S POLITICAL DYNASTY IN THE ITI OCTAVIA JAYABAYA-ADE SUMARDI ELECTION

Imron Wasi, Panji Anugrah Permana

Universitas Indonesia

Email: imronwasi7@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the political movement initiated by civil society in opposing a single candidate pair that has political affiliations to local political families in the 2018 Pilkada in Lebak Regency. This research discusses the emergence of the Kotak Kosong political movement and the mechanisms carried out by the opposition that joined Kotak Kosong in fighting the hegemony of political families. This research also discusses the incumbent's way of stemming the flow of opposition, so that on a political scale and territory the opposition group does not win. The research method used is a qualitative method with a case study approach. The author uses Boundary Control literature (Gibson, 2012) and subnational democratization and social movements (Trix Van Mierlo, 2021). The results showed that on the one hand, incumbents carried out boundary closing to maintain their power with mechanisms of power parochialization, political party financing, and patronage. Meanwhile, on the other hand, opposition groups conducted boundary opening to attract the attention of national elites in the 2018 Pilkada. The emergence of this political movement is something new in the midst of political family hegemony. As a result, the emergence of this political movement is due to the closed structure of political opportunities and the opposition has failed. This is because the strategy used is not carried out comprehensively, but only in certain areas, the absence of democratic candidates that are supported, only supporting the Empty Box as a political tool, and the Barisan Juang Kotak Kosong movement that cannot bring the interests of national elites to the regions.

Keywords: *political movement, regional election, political family, boundary closing, boundary opening*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas gerakan politik yang diprakasai oleh masyarakat sipil dalam menentang pasangan calon tunggal yang memiliki afiliasi politik kepada keluarga politik lokal pada Pilkada 2018 di Kabupaten Lebak. Penelitian ini membahas kemunculan dari gerakan politik Kotak Kosong dan mekanisme yang dilakukan oleh oposisi yang tergabung ke Kotak Kosong dalam melawan hegemoni keluarga politik. Penelitian ini juga membahas cara petahana dalam membendung arus oposisi, agar secara skala dan teritorial politik kelompok oposisi tidak memperoleh kemenangan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penulis menggunakan literatur *Boundary Control* (Gibson, 2012) dan demokratisasi subnasional dan gerakan sosial (Trix Van Mierlo, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di satu sisi, petahana melakukan *boundary closing* untuk mempertahankan kekuasaannya dengan mekanisme parokialisasi kekuasaan, pemborongan partai politik, dan patronase. Sedangkan, di sisi yang lain, kelompok oposisi melakukan *boundary opening* untuk menarik atensi elite nasional dalam Pilkada 2018. Kemunculan gerakan politik ini menjadi sesuatu yang baru di tengah hegemoni keluarga politik. Hasilnya, kemunculan gerakan politik ini karena struktur peluang politik yang tertutup dan oposisi mengalami kegagalan. Sebab, strategi yang digunakan tidak dilakukan secara komprehensif, melainkan hanya ada di wilayah tertentu, tidak adanya kandidat demokratis yang didukung, hanya mendukung Kotak Kosong sebagai alat politik, dan gerakan Barisan Juang Kotak Kosong yang tidak bisa membawa kepentingan elite nasional ke daerah.

Kata kunci: gerakan politik, pilkada, keluarga politik, boundary closing, boundary opening



PENDAHULUAN

Setelah reformasi politik bergulir pada 1998, sebagian besar ada perubahan yang secara eksplisit bisa dilihat, termasuk adanya sejumlah regulasi yang berkenaan dengan politik. Dalam hal ini, pemilihan kepala daerah yang semula diwakili oleh para wakil rakyat di parlemen. Saat ini, dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini diatur melalui kebijakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola jalannya roda pemerintahan di tingkat lokal ini karena otonomi yang diberikan apabila merujuk pada regulasi tersebut.

Munculnya kebijakan ini juga mengawali proses politik baru di Tanah Air. Sebab, saat ini masyarakat memiliki daulatnya sebagai warga negara yang bisa memilih para kontestan yang akan berlaga dalam sebuah panggung politik sekaligus yang akan mewakili mereka di lembaga pemerintahan. Seperti yang sudah diketahui pergelaran pemilihan kepala daerah ini untuk pertama kalinya digelar pada Juni 2005. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara terbuka pada 2005 ini alih-alih untuk mengisolasi praktik-praktik *money politics* yang terjadi oleh DPRD saat proses pemilihan jabatan eksekutif di daerah, justru praktik tersebut merambah dalam kontes Pilkada langsung yang luas. Sebagaimana yang sudah terilustasi dalam studi Pratikno (2007), yang mengemukakan politik transaksional yang diharapkan bisa diminimalisir melalui Pilkada Langsung, ternyata justru terjadi pada skala yang lebih besar dan masif dibandingkan dengan Pilkada melalui DPRD (Pratikno, 2007).¹

Padahal, lahirnya otonomi ini tentunya untuk memastikan agar daerah dapat menjalankan otoritas di wilayahnya mengenai demokrasi agar lebih optimal. Pilkada ini bisa lebih meningkatkan semangat pendalaman demokrasi pada level lokal (Prihatmoko, 2003). Seiring perkembangan proses elektoral tersebut, kini pemilihan kepala daerah mengalami format yang berbeda pula, yakni pemilihan kepala daerah

yang digelar secara serentak. Pilkada yang dilakukan secara serentak ini tentu dalam persepsi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan proses elektoral tersebut. Secara sistemik pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini yang dikompetisikan secara serentak dimulai sejak 2015 silam. Pelaksanaan proses elektoral secara serentak ini tampaknya akan dilakukan secara reguler oleh pemerintah untuk menciptakan keefektifan dalam mengelola roda pemerintahan.

Pada saat yang sama, pasca-kontestasi pada 2015 tersebut, pemilihan kepala daerah ini juga dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya, seperti Pilkada Serentak 2017, Pilkada Serentak 2018, dan yang mutakhir pada Pilkada Serentak 2020. Sampai saat ini, terutama sejak dimulainya pentas politik pemilihan kepala daerah secara serentak ini telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali. Dalam perspektif penulis, pergelaran sirkulasi politik dalam rangka menentukan pemimpin di daerah ini juga yang melalui mekanisme pemilihan kepala daerah serentak tampaknya telah diikuti oleh ratusan daerah.

Selain itu, seiring banyaknya keikutsertaan daerah dalam kompetisi pemilihan kepala daerah serentak ini telah menimbulkan dinamika politik di tingkat lokal. Dengan kata lain, melahirkan fenomena-fenomena politik baru, misalnya, dari sejumlah daerah tersebut yang mengikuti proses politik ini telah menciptakan sebagian kontestan tanpa perlawanan atau dalam istilah lainnya disebut tanpa adanya kandidat lain yang bertarung alias calon tunggal.

Dalam proses elektoral di Indonesia, partai politik memiliki sejumlah peran yang sangat sentral dalam menentukan regenerasi kepemimpinan nasional dan daerah. Sebagaimana yang telah diuraikan oleh para ilmuwan politik mengenai tugas, pokok, dan fungsi dari partai politik. Keterlibatan partai politik dalam menentukan para kandidat dalam proses elektoral ini juga turut mengonfirmasi peranan yang utama tersebut. Akibatnya, pengambilan keputusan dalam sejumlah kompetisi elektoral ditentukan oleh partai politik. Meski demikian, dalam pemilihan kepala daerah di tingkat lokal, para kandidat yang tidak memperoleh dukungan

¹ Pratikno juga mempunyai sebuah asumsi soal praktik *money politics*. Menurutnya, akan lebih sulit dilakukan karena pemegang hak suara adalah semua warga negara yang memiliki hak pilih.

dari partai politik, bisa maju dalam kompetisi tersebut dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan, yaitu, harus memperoleh dukungan dari masyarakat melalui akumulasi dukungan yang berbentuk identitas warga.

Seperti yang telah disebut di awal, masyarakat yang hendak maju dalam gelanggang politik di tingkat lokal ini bisa maju, tanpa dukungan dari partai politik, dengan syarat dan ketentuan sudah memenuhi sejumlah persyaratan yang sudah ditetapkan. Hal ini terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang telah melahirkan dan bisa dijadikan prasyarat atau landasan hukum untuk maju dalam kompetisi lokal. Selain itu, putusan lembaga ini juga tampaknya membuat kontestan memiliki alternatif lain di tengah hegemoninya partai politik di Indonesia, termasuk di tingkat lokal. Sehingga, partisipasi dan kontestasi akan berjalan secara ideal, jika proses ini berjalan secara maksimal, tanpa adanya konsensus di balik layar.

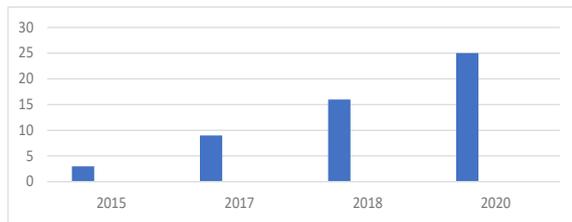
Sebab, secara faktual, selama proses Pilkada Serentak dilakukan, telah memunculkan kandidat-kandidat tunggal yang ada di beberapa daerah. Setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-XIII/2015 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mengatur sejumlah elemen substansial, seperti, hanya memunculkan satu pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah, sudah barang tentu akan tetap dilaksanakan pemilihan, terutama jika merujuk pada salah satu diktum yang tertera pada regulasi UU Nomor 10 Tahun 2016.²

2 Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 ini mengatur sejumlah hal yang sesuai terhadap kontestasi di tingkat lokal untuk memilih pemimpin seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pada saat yang sama, dalam salah satu diktum Pasal 54C (2) dikemukakan secara lugas bahwa pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kotak yang terdiri atas 1 (satu) kotak yang memuat

Dalam konteks ini, agar ruang kontestasi tetap bertalian terhadap demokrasi, maka pemerintah membuat sebuah aturan yang mengatur kompetisi ini dengan menghadirkan dalam kotak surat suara antara pasangan calon yang bergambar dan satu Kotak Kosong yang tidak bergambar, apabila di daerah-daerah tertentu hanya ada satu pasangan calon, seperti yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah secara serentak di Kabupaten Lebak pada 2018 yang lalu. Hal ini dilakukan untuk menjaga kontestasi politik berjalan. Dalam bahasa lain, para pemilih bisa menentukan pilihannya di antara dua kotak tersebut. Selama perhelatan elektoral dalam panggung politik lokal ini sejak 2015-2018 telah diikuti ratusan daerah dan beberapa pasangan calon tunggal, termasuk pada kontestasi Pilkada 2020.

Seperti, pemilihan kepala daerah pada 2015 silam, sebanyak 269 juga mengawali proses munculnya pasangan calon tunggal, diikuti pada Pilkada 2017 dari 101 Pilkada, telah memunculkan 9 kandidat calon tunggal. Di samping itu, pada 2018 silam juga sama, dengan jumlah 171 yang mengikuti Pilkada, sebanyak 16 kandidat calon tunggal dan pada kontestasi pemilihan kepala daerah 2020 yang lalu diikuti sebanyak 25 pasangan calon tunggal. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah yang digelar secara serentak ini sejak lima tahun terakhir, telah meningkatkan pasangan calon tunggal yang meningkat secara tajam. Seperti yang terlihat pada tabel berikut, yaitu:

foto pasangan calon dan 1 (satu) kotak kosong yang tidak bergambar.



Grafik 1. Pilkada Serentak dengan Pasangan Calon Tunggal pada 2015-2020

Sumber: data diolah penulis dari berbagai sumber, 2022.

Pada awalnya, pemilihan kepala daerah serentak pada 2018 di Kabupaten Lebak ini akan diikuti oleh ketiga kandidat yang akan maju dalam kompetisi elektoral ini, termasuk petahana (Iti-Ade) yang kembali masuk arena politik. Di samping itu, ada kandidat lainnya, seperti pasangan Cecep Sumarno-Didin Saparudin dan Ahmad Jazuli-Sofyan. Kedua pasangan yang terakhir ini, tidak memperoleh dukungan dari partai politik sebagai peserta pemilu. Karena, partai politik yang ada telah memberikan dukungannya kepada petahana. Dengan demikian, kedua pasangan terakhir ini maju melalui jalur independen. Pada saat yang sama, agar kandidat-kandidat independen ini memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sudah tentu harus memperoleh dukungan politik dari masyarakat dalam bentuk identitas seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) maupun surat keterangan yang diterbitkan oleh institusi seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasangan calon yang maju melalui jalur independen ini harus bekerja secara sistemik. Sebab, harus memperoleh dukungan yang cukup besar agar memenuhi persyaratan. Pasangan Cecep Sumarno-Didin Saparudin yang telah menyerahkan berkas pendaftaran kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak pada Rabu (9/11) atau sebelum kurun waktu batas akhir penyerahan berkas ditutup. Dalam kaitan ini, pasangan ini mengatakan bahwa persyaratan yang telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum sudah sesuai persyaratan yang ditetapkan, bahkan sampai 71 lembar E-KTP (Detik.com, 2017). Hal ini telah melewati batas persyaratan yang ditetapkan oleh KPU, seperti

yang telah dikemukakan oleh komisioner KPU, Ahmad Saparudin, kandidat yang maju melalui jalur independen harus mencapai dukungan sebanyak 70.233 (Gunawan, 2017).

Namun, saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak melakukan verifikasi dukungan publik atas kandidat Cecep Sumarno-Didin Saparudin yang mengklaim telah melewati batas persyaratan, justru mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Hasil dari verifikasi dukungan yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebak sebanyak 44.401. Dukungan sebanyak ini tampaknya tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh KPU Lebak sebanyak 70.233. Sehingga, pasangan Cecep Sumarno-Didin Saparudin mengalami kegagalan alias tidak bisa maju dalam panggung politik ini, termasuk pasangan dari Jazuli-Sofyan. Akibatnya, saat kandidat-kandidat yang awalnya akan maju melalui jalur perseorangan ini terisolasi dari arena politik.

Kegagalan para kandidat yang maju melalui jalur perseorangan ini tidak memenuhi persyaratan tampaknya membawa kondisi politik lokal mengalami perbedaan, yang semula belum pernah muncul dalam konteks politik lokal, terutama saat Pilkada digelar pada 2005 silam. Sehingga, yang memenuhi persyaratan hanya pasangan Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi yang sekaligus sebagai petahana.

Pasangan calon tunggal (Iti-Ade) adalah petahana yang kembali maju dalam Pilkada Lebak 2018. Keduanya memiliki latar belakang politik yang berbeda. Iti Octavia Jayabaya berasal dari Partai Demokrat dan Ade Sumardi dari PDI Perjuangan. Keduanya, telah lama muncul dalam arena politik lokal. Dalam pemilihan kepala daerah 2018 yang lalu, pasangan ini disebut sebagai pasangan calon tunggal, karena tidak ada kandidat lain yang sudah memenuhi syarat. Alhasil, pasangan ini harus melawan Kotak Kosong, seperti yang telah terjadi di 16 (enam belas) kabupaten/kota di Indonesia pada Pilkada 2018.

Petahana memang memiliki keuntungan. Petahana memiliki sumber daya yang besar untuk menciptakan atau memobilisasi massa dan lazimnya di berbagai daerah petahana akan

unggul, kecuali dalam kontestasi pada Pilkada 2018 di Kota Makassar yang mana pasangan calon tunggal kalah oleh Kotak Kosong. Namun, yang menarik dalam konteks politik lokal di Kabupaten Lebak ini adalah munculnya gerakan dari masyarakat yang bernama Barisan Juang Kotak Kosong, sekaligus membawa isu/klaim politik seperti daerah otonomi baru atau pemekaran.

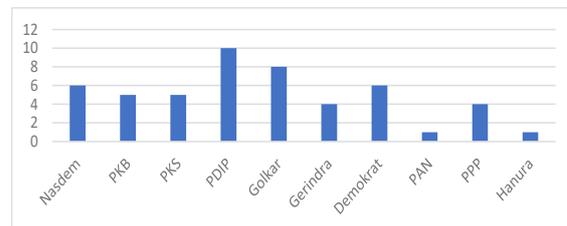
Gerakan politik Kotak Kosong ini muncul karena sejumlah faktor yang menyatukan masyarakat secara ekstensif. Pertama, kelompok ini memiliki persepsi yang sama dalam membentuk gerakan Kotak Kosong ini, mereka mengalami perasaan jenuh kepada keluarga politik Iti Octavia Jayabaya yang juga merupakan putri dari Mulyadi Jayabaya, yang disebut sebagai orang kuat lokal, termasuk telah menguasai struktur politik hampir menuju dua dasawarsa ini (Hakiki Hakim, wawancara personal, 9 November 2022). Kedua, munculnya kelompok Kotak Kosong yang telah diprakarsai masyarakat ini juga disatukan oleh suatu wacana politik yang muncul sejak rezim sebelumnya, yakni, daerah otonomi baru atau pemekaran (Hakiki Hakim, wawancara personal, 9 November 2022).

Hal ini bertalian pada kontestasi elektoral pada Pilkada Lebak 2018, karena Hakiki Hakim dan masyarakat yang tergabung dalam Barisan Juang Kotak Kosong membawa topik pemekaran sebagai alat politik untuk menentang petahana, terlebih Barisan Juang Kotak Kosong ini dideklarasikan pertama kali di Malingping, Lebak. Pilkada Lebak 2018 dijadikan momentum untuk membawa kepentingan daerah pemekaran agar memperoleh empati dari masyarakat di ruang publik. Selama ini, pemekaran selalu muncul dalam dinamika politik Lebak, bahkan sejak era Mulyadi Jayabaya. Sehingga, wacana pemekaran ini selalu muncul di ruang politik ini. Hal ini terlihat dari dideklarasikannya gerakan Kotak Kosong ini di wilayah Lebak Selatan. Gerakan politik ini juga sudah terbentuk sampai ke tingkat desa untuk menentang petahana maju dalam kompetisi elektoral, sekaligus menentang keluarga politik yang memiliki kekuatan superior

di tingkat lokal.

Secara realitas politik, pasangan Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi yang dikenal sebagai petahana telah didukung oleh sejumlah partai politik pengusung dan pendukung, yang mencakup berbagai entitas partai politik, yaitu, Partai Demokrat, PDIP, Golkar, PKS, PPP, PKB, Gerindra, Hanura, PAN, PBB, dan NasDem. Kedua partai ini dalam hasil Pemilu 2014 menunjukkan pencapaian yang cukup besar, misalnya, PDIP 10 kursi dan Demokrat sebanyak 6 kursi di DPRD Kabupaten Lebak.

Sedangkan parpol lainnya di bawah kedua parpol ini. Namun, di sisi yang lain ada satu partai yang memperoleh kursi cukup besar di atas Partai Demokrat, yakni Partai Golkar yang memperoleh kursi sebanyak 8 kursi. Pada dasarnya, perolehan kursi yang telah diraih pada pemilu 2014 yang lalu antarpartai politik juga berbeda, seperti: Partai Nasdem memperoleh kursi sebanyak 6 kursi, PKB 5 kursi, PKS 5 kursi, PDIP 10 kursi, Golkar 8 kursi, Gerindra 4 kursi, Demokrat 6 kursi, PAN 1 kursi, PPP 4 kursi, dan Hanura 1 kursi.



Grafik 2. Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Lebak pada Pemilu 2014

Sumber: diolah penulis dari Puskapol UI, 2023.

Dukungan yang diberikan oleh partai politik terhadap petahana pada Pilkada Lebak 2018 ini juga tidak bisa dinafikan dari komunikasi politik yang dilakukan oleh Mulyadi Jayabaya sebagai ayah dari Iti Octavia Jayabaya. Sebelumnya, partai politik ini mencoba menjalin komunikasi politik agar terbentuk koalisi untuk menghadapi petahana, seperti Partai Nasdem dan PKS. Bahkan, Partai Nasdem melakukan penjaringan bagi bakal calon bupati, termasuk petahana juga ikut dalam proses penjaringan di Partai Nasdem

ini. Namun, proses ini tidak berjalan maksimal, karena seluruh partai politik memberikan dukungannya kepada petahana.

Pada dasarnya, kandidat lainnya yang mencoba ikut kompetisi elektoral ini juga ada, tapi para kandidat ini maju melalui jalur perseorangan karena tidak memperoleh dukungan dari partai politik, seperti pasangan pasangan Cecep Sumarno-Didin Saparudin dan Ahmad Jazuli-Sofyan. Kedua kandidat ini pada akhirnya tidak melenggang mulus dalam arena politik, karena tidak memenuhi persyaratan. Akibatnya, di tengah ketiadaan kandidat lain dalam proses elektoral ini, muncul sebuah gerakan politik dari masyarakat.

Masyarakat yang terasosiasi ke dalam kelompok Barisan Juang Kotak Kosong atau yang lebih dikenal sebagai BajuKoko ini telah membuat kontestasi politik pada Pilkada 2018 di Kabupaten Lebak menjadi menarik. Pertama, di tengah hegemoni keluarga Jayabaya, bisa muncul sebuah entitas dari masyarakat yang menentang pasangan calon tunggal ini. Kedua, lahirnya kelompok ini juga sebagai salah satu bentuk perlawanan masyarakat terhadap proses politik yang tidak menawarkan alternatif kepemimpinan. Ketiga, gerakan Kotak Kosong ini juga berbeda dengan daerah lainnya, yang memiliki relasi dengan kekuatan elite, sebagaimana yang telah terlihat dari studi Mayangsari (2019). Sedangkan, dalam konteks gerakan Kotak Kosong di Pilkada di Lebak ini justru lahir dari masyarakat. Dan yang keempat karena kejenuhan masyarakat terhadap perkembangan politik lokal yang hanya terdistribusi di keluarga politik Jayabaya.

Kemudian, di antara tiga wilayah yang mengikuti perhelatan politik ini, terutama di wilayah Banten, seperti Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Lebak memiliki hasil yang berbeda, termasuk dalam Kotak Kosong. kontestasi di Pilkada Kabupaten Tangerang dan Pilkada di Kota Tangerang ini juga berbeda. Sebab, Kotak Kosong di Kabupaten Tangerang memperoleh 16,28%. Sedangkan, Kotak Kosong di Kota Tangerang berhasil lebih tinggi, yaitu sebesar 18,47%. Dua wilayah yang ada di Banten ini, masing-masing pada Pilkada Serentak juga hanya ada

satu pasangan calon tunggal yang berhadapan dengan Kotak Kosong. Petahana sebagaimana dengan kekuatan politiknya telah berhasil mempertahankan kekuasaannya. Di antara dua daerah ini, terutama Kotak Kosong hanya memperoleh suara di bawah 20%.

Hal ini secara signifikan cukup berbeda dengan apa yang telah terjadi di Pilkada Serentak 2018 Kabupaten Lebak. Pasangan calon tunggal yang terdiri dari Iti-Ade hanya memperoleh suara sebanyak 76,99%. Perolehan suara ini tentunya di bawah dua daerah yang sudah disebut di atas. Pada saat yang sama, perolehan suara dari Kotak Kosong sebesar 23,01% atau di atas dua daerah seperti yang sudah diuraikan di awal (Romli, 2018).

Pola dari gerakan Kotak Kosong yang diprakarsai oleh masyarakat ini sebetulnya berbeda dengan gerakan Kotak Kosong yang ada di Kota Makassar, yang telah melibatkan elite dalam kontestasi tersebut. Sehingga, pasangan non-petahana yang dianggap memiliki relasi sosio-politik yang genuine tidak bisa memanfaatkan kontestasi yang sekadar diikuti pasangan calon tunggal. studi ini juga memiliki perbedaan dengan studi lainnya yang mengulas gerakan masyarakat yang tergabung dalam kelompok Kotak Kosong.

Sebagaimana yang telah terjadi di Kabupaten Pati dan Kota Makassar yang telah melibatkan elite dalam proses elektoral ini. Sedangkan, dalam konteks Pilkada Lebak 2018 yang lalu, bisa ditemukan sejumlah perbedaan, yaitu, gerakan masyarakat yang tergabung dalam BajuKoko ini tidak melibatkan elite politik, melainkan berbasiskan masyarakat (*societal-based*). Di samping itu, BajuKoko ini juga muncul di tengah hegemoni keluarga politik yang sudah mengakar sedari awal, karena kuatnya orang kuat lokal. Pada saat yang sama, gerakan masyarakat ini justru lahir dalam masyarakat yang rural sekaligus membangun isu/klaim politik pemekaran.

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, penelitian ini juga telah memerhatikan penelitian terdahulu. Dalam konteks ini, penulis juga menggunakan telaah teoritik, terutama teori *boundary control* Edward

L Gibson (2012) dan demokratisasi subnasional dan gerakan sosial yang telah diulas oleh Trix Van Mierlo (2021).

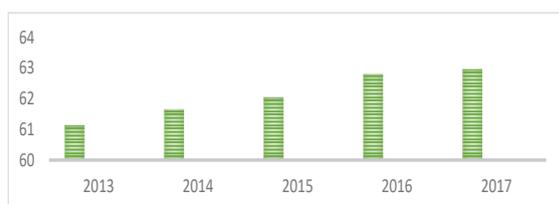
METODE

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Di samping itu, dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif sekaligus berhasil mewawancarai berbagai pihak, seperti Ketua Barisan Juang Kotak Kosong (Bajukoko), pengurus partai politik, dan pasangan calon tunggal yaitu Iti Octavia Jayabaya dan Ade Sumardi.

PEMBAHASAN

Barisan Juang Kotak Kosong membuat Klaim Politik

Dalam konteks demokrasi di negara berkembang seperti Indonesia, persepsi publik terhadap petahana akan cenderung bersifat negatif, seperti, petahana identik dengan buruknya kinerja; petahana dianggap terkait dengan korupsi; petahana menelusuri kombinasi batas masa jabatan; perburuan rente dan partai politik yang lemah, sehingga penantang harus lebih tinggi daripada petahana (Jessica, 2011). Persepsi masyarakat dalam melihat kekuasaan politik lokal ini juga cenderung negatif, karena arena politik lokal yang telah dikuasai petahana belum bisa membuat transformasi besar, melainkan masih terbatasnya segala bentuk pelayanan, pembangunan, dan lain sebagainya atau masih memunculkan perbedaan yang tinggi, terutama kondisi daerah di Kabupaten Lebak masih jauh tertinggal dari kabupaten/kota lainnya yang ada di Banten.



Grafik 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lebak 2013-2017

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2017)
Badan Pusat Statistik, 2018).

Dalam kaitan ini, para aktor masyarakat sipil yang terlibat dalam gerakan politik Barisan Juang Kotak Kosong ini tentunya disatukan oleh satu persepsi mengenai klaim/isu sosio-ekonomi-politik yang berkelindan di ruang publik seperti perbedaan yang tinggi, termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan lain sebagainya antara masyarakat di perkotaan dan pesisir.

Menilik pada tabel di atas, di satu sisi indeks pembangunan manusia Kabupaten Lebak pada periode pertama petahana (Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi) memimpin telah mengalami peningkatan. Akan tetapi, peningkatan ini tidak secara signifikan dan masih berada di posisi terendah di antara kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten. Bahkan, daerah ini juga masuk dalam kategori daerah tertinggal, seperti yang telah tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.

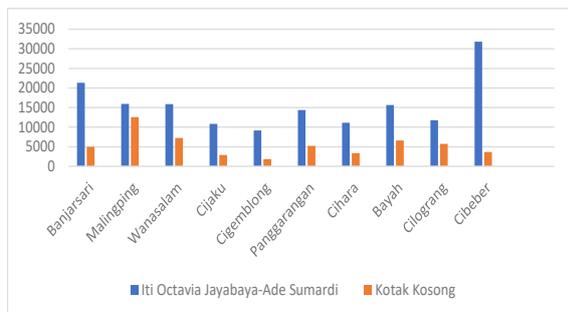
Sehingga, gerakan politik Barisan Juang Kotak Kosong (Bajukoko) ini membuat suatu isu dan klaim politik mengenai daerah otonomi baru agar bisa menjadi pemantik bagi masyarakat lainnya untuk bergabung karena persamaan kondisi yang sama. Pada saat yang sama, deklarasi gerakan politik Barisan Juang Kotak Kosong ini pertama kali dilakukan daerah Lebak Selatan, terlebih diprakarsai oleh Hakiki Hakim sebagai ketua/panglima dari Bajukoko sekaligus sebagai aktor yang terlibat dalam upaya pemekaran wilayah ini sebagai pengurus Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten (Bakor PKC) Cilangkahan.

Sejumlah daerah yang masuk dalam rencana pembentukan dan pemekaran wilayah ini terdiri dari, Kecamatan Banjarsari (20 desa); Malingping (14 Desa); Wanasalam (13 Desa); Cijaku (10 Desa); Cigemblong (9 Desa); Panggarangan (11 Desa); Cihara 9 Desa); Bayah (11 Desa); Ciligrang (10 Desa); dan Cibeber (22 Desa).

Pembentukan Barisan Juang Kotak Kosong juga tidak bisa menyangkal dari adanya kepentingan aktor-aktor tertentu agar selalu menarasikan wacana pemekaran wilayah ini. Kompetisi elektoral ini seperti dijadikan sebagai

arena politik yang tepat untuk mengkampanyekan wacana pemekaran wilayah. Sebab, setelah proses elektoral ini usai, kampanye atau narasi ini cenderung menghilang dari pembahasan publik.

Meskipun, aktor-aktor yang terlibat dalam Barisan Juang Kotak Kosong ini di awal telah dideklarasikan di Malingping, yang masuk sebagai wilayah dari wacana pemekaran wilayah dan membangun suatu isu dan klaim politik pemekaran wilayah, tampaknya tidak memiliki korelasi yang signifikan dalam mengajak dan menentukan pilihan politik masyarakat untuk memilih Kotak Kosong. Sebagaimana yang tercermin pada hasil perolehan suara, dimana daerah yang masuk dalam wacana pemekaran wilayah ini tetap diungguli oleh petahana.



Grafik 4. Perolehan Suara Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi dan Kotak Kosong pada Pilkada Lebak 2018 di Wilayah Lebak Selatan

Sumber: data diolah penulis dari KPU Lebak, 2023.

Secara faktual, hasil yang telah diperoleh di wilayah Kecamatan Malingping ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Barisan Juang Kotak Kosong (Bajukoko), karena di sini ada salah satu desa yang memiliki nama Cilangkahan yang sekaligus menjadi nama daerah yang masuk dalam wacana pemekaran atau daerah otonomi baru, terlebih pada sebagian desa yang ada di Kecamatan Malingping; Kotak Kosong berhasil meraih kemenangan, seperti di Desa Cilangkahan, Malingpin Selatan, Rahong, Sanghiang, dan Sukamanah. Dengan kata lain, pengaruh dari gerakan politik di Malingping ini berdampak pada lima desa yang telah diraih oleh Kotak Kosong. Sedangkan, petahana memperoleh sebesar 15.906 dan daerah-daerah lainnya tertinggal sangat jauh.

Tabel 1. Perolehan Suara Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi dan Kotak Kosong di Kecamatan Malingping

No	Desa	Iti-Ade	Kotak Kosong
1	Cilangkahan	43,69%	56,31%
2	Malingping Selatan	48,83%	51,17%
3	Rahong	45,17%	54,83%
4	Sanghiang	46,03%	53,97%
5	Sukamanah	41,26%	58,74%

Sumber: diolah dari (Mahpudin, 2021).

Barisan Juang Kotak Kosong Membangun Aliansi Anti Petahana

Para aktor masyarakat sipil yang tergabung dalam Barisan Juang Kotak Kosong (Bajukoko) ini sesungguhnya bisa memperluas skala dan teritorial politiknya untuk membuat aliansi politik dengan kelompok lainnya, seperti kelompok masyarakat sipil regional, nasional, dan internasional (Mierlo, 2021). Gerakan politik untuk mengajak masyarakat sipil lainnya terlibat, Ahmad Hakiki Hakim sebagai ketua/panglima dari kelompok Barisan Juang Kotak Kosong (Bajukoko) ini secara sistemik terus melakukan perluasan skala dengan mentransmisikan informasi melalui media massa maupun media sosial kepada publik agar tidak golput dalam Pilkada Lebak 2018 dan justru harus dapat memanfaatkannya dan menentukan pilihan pada Kotak Kosong.

Bahkan, sebagai salah satu bentuk komitmen gerakan politik ini, kelompok Barisan Juang Kotak Kosong (Bajukoko) juga membuat posko pemenangan. Sebagai aktor politik yang ada di Barisan Juang Kotak Kosong (Bajukoko), Ahmad Hakiki Hakim mengatakan bahwa ia sudah membangun komunikasi sedari awal sebelum kontestasi elektoral digelar, terutama komunikasi ini dilakukan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Gerakan politik ini mencoba menarik semua segmentasi agar dapat ikutserta melawan petahana melalui Barisan Juang Kotak Kosong (Bajukoko) dengan memilih Kotak Kosong. Dengan kata lain, tidak ada kluster segmentasi masyarakat sipil mana yang akan dilibatkan. Sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh Hakiki Hakim bahwa pembangunan aliansi ini

tidak berfokus pada satu-dua-tiga segmentasi seperti tokoh agama, petani, nelayan, dan lain sebagainya, melainkan semua komponen (Ahmad Hakiki Hakim, wawancara personal, 27 Maret 2023).

Dalam membangun aliansi ini, agar masyarakat memiliki empati terhadap gerakan politik ini, Barisan Juang Kotak Kosong membangun kekuatan politik melalui isu/klaim pemekaran, dinasti politik, rezim yang hanya sekadar janji atau belum memberikan pelayanan prima, pembangunan yang tidak merata, dan penguasaan sumber daya ekonomi oleh keluarga politik.

Barisan Juang Kotak Kosong Mengkampanyekan Kotak Kosong

Gerakan politik yang diprakarsai oleh para aktor masyarakat sipil yang tergabung dalam kelompok Barisan Juang Kotak Kosong (Bajukoko) ini sejak awal sudah mencoba memperluas arena dan skala teritorial politik agar masyarakat sipil maupun kelompok lainnya ikutserta melakukan perlawanan politik terhadap petahana. Metode yang dilakukan oleh kelompok ini menggunakan sebuah isu/klaim dan kebijakan politik yang selama ini berkelindan dalam panggung politik lokal, seperti pembangunan, pelayanan, ketimpangan, dan kesejahteraan yang belum terealisasi oleh petahana. Selain itu, petahana juga memiliki relasi dengan keluarga politik Mulyadi Jayabaya, yang selama ia menjabat wacana pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru juga muncul.

Kandidat yang diusungnya adalah Kotak Kosong. Namun, Kotak Kosong menjadi alat politik untuk melawan kekuatan keluarga politik yang semakin menghegemoni dalam struktur politik lokal. Karena, tidak ada kandidat demokratis lainnya yang *vis a vis* melawan petahana dan keluarga politik lokal. Kemudian, tidak adanya arena politik bagi kelompok Barisan Juang Kotak Kosong (Bajukoko) ini membuat gerakan politiknya juga terhambat karena berbenturan dengan ketentuan prosedural yang ada.

Kelompok Barisan Juang Kotak Kosong (Bajukoko) ini membangun 'kampanye politik'

yang bersifat kontradiktif dengan petahana. Di satu sisi, pada periode kedua petahana maju dalam gelanggang politik lokal, pasangan Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi ini memiliki agenda kampanye untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pola pembangunan pariwisata. Pada saat yang sama, Iti Octavia Jayabaya juga mengatakan bahwa visinya di periode kedua adalah menjadi Lebak sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal (Iti Octavia Jayabaya, wawancara personal, 12 Mei 2023).

Gerakan politik dari kelompok Barisan Juang Kotak Kosong (Bajukoko) cenderung mengkampanyekan ihwal kegelisahan publik, seperti kemiskinan, pelayanan yang tidak ideal, dan pembangunan yang masih jauh panggang dari api, salah satunya wacana pemekaran wilayah yang digulirkan kembali karena janji politik dari keluarga politik Mulyadi Jayabaya.

Strategi Politik Petahana dalam Membendung Kekuatan Politik dari Barisan Juang Kotak Kosong

Keberhasilan petahana dalam melakukan kontrol batas melalui skema penutupan batas (*boundary closing*) ini memiliki implikasi pada peta politik lokal, termasuk aksesibilitas yang tidak mudah diperoleh kedua kandidat lainnya, terutama bentuk dukungan dari partai politik. Dengan kata lain, kedua kandidat ini maju melalui jalur perseorangan, tanpa didukung oleh satu partai politik sebagai peserta pilkada. Keberhasilan pasangan Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi dalam menutup aksesibilitas lawan politik tidak bisa menyangkal, karena kekuatan politik yang dimiliki petahana juga besar, termasuk adanya kekuatan dari keluarga politik Jayabaya. Sehingga, kekuasaan petahana semakin kuat, terlebih didukung oleh orang kuat lokal (*local strongmen*).

Kemenangan petahana pada Pilkada 2018 ini karena pasangan Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi juga melakukan strategi agar kekuasaannya tetap bertahan. Meminjam istilah Gibson, petahana akan mempertahankan kekuasaannya melalui kontrol batas, seperti parokialisasi kekuasaan, nasionalisasi pengaruh,

dan monopolisasi hubungan nasional-subnasional (Gibson, 2012). Di samping itu, petahana juga berhasil melakukan dan membangun aliansi politik besar dengan partai politik, sehingga tidak ada satu partai politik lainnya di luar Partai PDI Perjuangan dan Partai Demokrat yang mencoba mengusung kadernya tampil dalam kontestasi tersebut. Sementara itu, petahana dan keluarga politik ini juga turut menggunakan pola patronase dalam konteks politik lokal, seperti membangun hubungan patron-klien dengan berbagai figur seperti tokoh agama, maupun terhadap pimpinan organisasi sosial, politik, maupun kepemudaan.

Parokialisasi Kekuasaan: Jejaring Birokrasi

Parokialisasi kekuasaan³ dijadikan sebagai *tools* untuk menciptakan kontrol politik, agar petahana dapat mempertahankan *status quo* yang dimilikinya, terlebih untuk kepentingan keluarga politik. Tak ayal, eksistensi dari keluarga politik di tingkat lokal ini juga ditengarai setelah topografi politik domestik mengalami transformasi, yang semula bersifat sentralisasi menuju sistem yang lebih desentralisasi. Kebijakan desentralisasi merupakan suatu bentuk institusional atas lokalisasi kekuasaan (Harriss, Stokke, & Tornquist, 2004), termasuk telah melahirkan *figure-based politics* atau *local populisme* (Mas'udi, 2017), yang melahirkan para elite lokal.

Para elite lokal ini muncul karena bisa membangun dan menghegemoni sumber daya maupun entitas publik lainnya, dan cenderung lebih permisif pasca-reformasi. Alhasil, kondisi politik lokal saat ini didominasi oleh sebagian keluarga politik, salah satunya seperti yang muncul dalam arena politik di Lebak. Kondisi ini tentunya telah membuat desentralisasi seperti menjadi pendulum kekuasaan para keluarga politik di Indonesia. Akan tetapi, fenomena politik ini bukan hanya muncul di Indonesia,

melainkan di negara lainnya, seperti Thailand. Dalam perspektif Hadiz, desentralisasi di Thailand telah menopang kepentingan kekuatan predator lokal (Hadiz, 2022).

Dalam perspektif penulis, terutama saat proses elektoral pada Pilkada 2018 di Lebak, petahana juga turut melakukan mobilisasi jejaring yang dimilikinya, terutama melibatkan perangkat daerah sampai ke tingkat yang lebih kecil. Seperti yang telah disampaikan oleh Dedi Jubaedi sebagai pimpinan partai politik yang juga partainya mendukung petahana dalam format koalisi besar ini. Sebagai pimpinan partai Nasdem, Jubaedi mengatakan bahwa dalam proses pemilihan kepala daerah 2018 yang lalu, pasangan Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi menggunakan jejaring birokrasi dalam kontestasinya, terutama jejaring yang ada di wilayah kecamatan (camat) dan desa (kepala desa), ditambah secara letak geografis, jumlah pemerintahan administratif seperti kecamatan di Lebak mencapai 28 kecamatan dan sebanyak 345 desa/kelurahan (Dedi Jubaedi, wawancara personal, 17 April 2023). Sebagai bagian dari modal sosial, jejaring birokrasi ini memang sangatlah penting dalam kontestasi elektoral. Seperti yang telah ada dalam sebuah literatur mengenai modal, bahwa modal mesti ada dalam sebuah ranah, agar ranah tersebut dapat memiliki arti (Mahar, Harker, & Wilkes, 2009). Sebab, modal sosial akan berkelindan terhadap jenis relasi atau jaringan, termasuk berkenaan terhadap sumber daya, baik aktual maupun maya, yang bertambah pada seorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama melalui hubungan timbal balik dari perkenalan dan pengakuan yang kurang lebih terlembagakan (Bourdieu & Wacquant, 1992).

Parokialisasi kekuasaan memang menjadi salah satu strategi politik untuk melakukan kontrol batas, agar semua dimensi kekuatan dapat memberikan dukungan kepada petahana atau keluarga politik terutama munculnya otoritas yang dimilikinya sebagai elite politik, yang menguasai jejaring birokrasi sampai ke tingkat *grassroot*. secara faktual justru ada pejabat publik tingkat kecamatan yang melakukan *image* politik saat proses tahapan pemilu, seperti yang telah dilakukan oleh Camat

3 Parokialisasi kekuasaan dalam perspektif Gibson dapat dimaknai sebagai suatu strategi politik untuk mengontrol politik di tingkat lokal untuk meningkatkan hegemoni lokal. Misalnya, melibatkan institusi birokrasi.

Banjarsari. Karena, terdapat foto pasangan calon pada kegiatan LPPDES di Kecamatan Banjarsari. Menurut Masyhuri Sajim, hal ini tidak bisa menyangkal jika ada satu individu birokrat yang membuat kelompok atas dasar suka terhadap kepemimpinan petahana sangatlah wajar petahana (Ucuy Masyhuri Sajim, wawancara personal, 2 Mei 2023). Sebagai institusi yang memiliki wewenang untuk mengawasi kontestasi, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang kini menjadi Bawaslu Lebak memberikan surat kepada Camat Banjarsari agar tidak melakukan hal yang serupa. Selain itu, dua kades di kecamatan Cipanas, Lebak, juga terindikasi melakukan pelanggaran karena bertemu pasangan calon saat proses kampanye, yaitu Kades Malangsari dan Kades Girilaya (Panwaslu, 2018).

Capaian keberhasilan petahana ini terdiri dari beberapa hal, yaitu: pertama, petahana memiliki waktu yang lama untuk sosialisasi, karena bisa bekerja sekaligus membangun image politik untuk meningkatkan *trust* publik. Dalam hal ini, ada upaya komunikasi secara intensif kepada para aktor formal yang sedang menduduki jabatan dalam suatu institusi negara maupun informal atau dalam bahasa Pareto dan Mosca ada kelompok *governing elite*, *non-governing elite*, dan *non-elite*. Kedua, petahana memiliki akses ke sumber daya keuangan sehingga mereka dapat menggunakan APBD untuk mempertahankan dukungan publik. Hal ini bisa terjalin saat ada proyek pemerintah yang menggunakan APBD ini dimonopoli oleh petahana dengan memberikan kuasa kepada pihak-pihak tertentu, meskipun harus ikutserta dalam proses lelang, terlebih jika ada akses yang mudah seperti penunjukkan langsung.

Pada dasarnya, proyek yang menggunakan anggaran daerah ini harus melalui pihak ketiga yang sudah memiliki legitimasi secara aturan. Dalam kaitan ini, saat ada pengusaha yang mendukung petahana pada proses elektoral ini, proyek-proyek ini akan disampaikan kepada para pengusaha, agar tidak terjadi konflik kepentingan antara tim yang sudah mendukung petahana sekaligus berbagi (Ucuy Masyhuri Sajim, wawancara personal, 2 Mei 2023). Seperti yang sudah diulas sebelumnya, yang

ketiga petahana memiliki akses ke birokrasi yang bisa dijadikan sebagai mesin politik untuk memperoleh dukungan publik dan keempat *petahana* akan didukung oleh partai besar karena memiliki elektabilitas yang tinggi. Sebagaimana yang juga muncul pada pembangunan koalisi besar pada Pilkada Lebak 2018.

Relasi Patronase Petahana dan Keluarga Politik

Dalam upaya menjaga stabilitas kekuasaan, terutama agar tetap bertalian dalam arena keluarga politik, petahana mencoba mengkonstruksi pola patron-klien, seperti relasi yang inheren yang dilakukan terhadap masyarakat, organisasi, tokoh agama, birokrasi, dan lain seterusnya. Indonesia sebagai sebuah negara yang menerapkan prinsip “demokrasi patronase” (Klinken 2009; Nordholt, Klinken, et al., 2007; Simandjuntak, 2010; 2012).

Keluarga politik ini telah berhasil melakukan hegemoni dalam struktur formal maupun informal. Dalam kuasa politik yang bersifat formal, misalnya, keluarga politik ini telah berhasil memenangkan kompetisi politik elektoral; baik dalam arena pemilihan bupati, anggota parlemen pusat maupun daerah, menempatkan keluarga politiknya di jejaring birokrasi. Kemudian, agar jejaring maupun distribusi kekuasaan yang sudah dilakukan ini berjalan secara ideal, atau dalam bahasa lain tidak mengalami resonansi politik, keluarga politik juga turut membangun interaksi politik secara informal.

Keluarga politik ini juga menyadari bahwa tanpa adanya dukungan maupun legitimasi dari para figur atau tokoh informal, resistensi kekuasaannya tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, salah satu cara yang digunakan ialah membangun struktur politik secara informal, di luar jejaring partai politik maupun jejaring formalnya. Seperti membangun kekuatan di luar relasi formal, seperti membangun relasi dengan organisasi masyarakat Islam dan sayap-sayap organisasinya, termasuk dalam struktur tim pemenangan petahana juga terdiri dari kelompok keagamaan dari muslim maupun non-muslim. Tim pemenangan petahana juga mencoba

meraih segmentasi kelompok agama dengan melibatkan figur-figur tertinggi masuk dalam tim pemenangan. Petahana juga memperluas upaya dukungan dengan melibatkan tokoh-tokoh ulama, kelompok adat, dan para pengusaha (Ucuy Masyhuri Sajim, wawancara personal, 2 Mei 2023). Bahkan, saat proses elektoral berjalan, para kandidat maupun keluarga politik memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap jejaring informal ini, seperti yang dikemukakan (Buehler & Paige Tan, 2007) bahwa kandidat bergantung pada jejaring personal yang informal.

Kekuatan politik yang dimiliki oleh Mulyadi Jayabaya sangatlah dominan dalam arena politik lokal, termasuk dalam menjalin komunikasi lintas partai politik, seperti yang telah diafirmasi oleh Iti Octavia Jayabaya bahwa dirinya tidak secara intensif membangun komunikasi dengan partai politik, melainkan Mulyadi Jayabaya (ayah) yang memiliki hubungan baik (Iti Octavia Jayabaya, wawancara personal, 12 Mei 2023). Hal serupa disampaikan Ade Sumardi sebagai Wakil Bupati dari Iti Octavia Jayabaya, bahwa sebagai orangtua sudah tentu akan mendukung putrinya, dan bentuk dukungan ini membangun komunikasi dengan para ulama, tokoh-tokoh, dan masyarakat (Ade Sumardi, wawancara personal, 2 Mei 2023).

Di samping itu, Ade Sumardi juga memiliki modalitas yang besar seperti menjadi pimpinan di DPC PDI Perjuangan, ia juga memiliki hubungan baik dengan kelompok masyarakat adat maupun masyarakat adat kasepuhan. Sehingga, akseptabilitasnya dalam segmentasi masyarakat adat sangat mudah diterima dengan sangat baik. Dengan demikian, dalam meraih kemenangan kontestasi elektoral 2018 yang lalu, segmentasi adat juga menjadi bagian integral dari kekuatan petahana, karena ada figur Ade Sumardi.

Oleh karena itu, tim pemenangan dari petahana juga berupaya menjalin komunikasi secara intensif dengan para tokoh agama yang terasosiasi ke dalam organisasi masyarakat Islam maupun sayap-sayap organisasi tersebut. Bahkan, bukan sekadar mengejar segmentasi pemilih muslim semata yang melibatkan pemimpin tokoh agama sebagai penyebab,

melainkan aktor dari non-muslim juga turut masuk sebagai tim pemenangan. Keterlibatan para pemimpin maupun aktor yang terlibat dalam organisasi keagamaan ini tampaknya menjadi alat politik untuk mengejar segmentasi pemilih muslim maupun non-muslim, terlebih dalam arena politik lokal masyarakat cenderung akan mengikuti pemimpinnya. Dalam kaitan ini, salah satu partai politik yang tergabung dalam Koalisi Iti-Ade (KITA), seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga turut membantu kemenangan Iti-Ade dengan mengaktifkan jejaring partai yang cenderung memiliki basis keislaman, seperti para ulama dan pimpinan pondok pesantren (Acep Dimiyati, wawancara personal, 26 April 2023).

Jejaring yang dikonstruksi ini berbentuk alokasi dan sumber daya, seperti anggaran, program dan manfaat pemerintah berupa kesejahteraan, dana pembangunan dan kontrak kerja (Syamsul Hidayat & Wardani, 2022). Namun, dalam konteks alokasi dan sumber daya ini tidak diberikan secara biasa, karena adanya unsur kedekatan karena sudah mendukung petahana, melainkan dilakukan secara profesional, dimana dilakukan sesuai aturan yang ada (Ade Sumardi, wawancara personal, 2 Mei 2023). Dengan kata lain, berbagai program yang ada di pemerintah daerah dilakukan secara profesional sesuai ketentuan regulasi yang ada. Menurutnya, program ini bisa diakses secara terbuka.

Pemborongan Partai Politik

Dalam upaya mempertahankan kekuasaannya, petahana akan mencoba melakukan berbagai strategi yang bisa dilakukan, seperti mengaktifkan berbagai relasi dan jaringan yang selama ini sudah tercipta, karena sudah membangun basis sejak petahana menjabat atau melanjutkan *legacy* politik yang sudah dikonstruksi oleh keluarga politik selama ini, salah satu mekanisme yang dilakukan adalah melakukan atau membangun aliansi politik yang besar. Dengan kata lain, pada pemilihan kepala daerah 2018 silam, petahana melakukan koalisi besar yang didukung oleh partai politik sebagai peserta pemilu. Konfigurasi politik pada pemilihan kepala daerah 2018 ini mengalami perbedaan dengan pilkada

sebelumnya, sebagaimana yang akan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Nama-Nama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan Koalisi Partai Politik serta Perolehan Suara pada Pilkada 2013 serta Pilkada 2018 di Kabupaten Lebak

No	Nama kandidat	Koalisi Partai Politik pada Pilkada	Perolehan Suara (%)
		2013	
1	Pepep Paisaludin-Aang Rasyidi	Jalur perseorangan	3,21 persen
2	Amir Hamzah-Kasmin	Partai Golkar	36,24 persen
3	Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi	Demokrat, PDI-P, Hanura, Gerindra, PPP, PKS, dan PKNU.	60,55 persen
2018			
1	Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi	Demokrat, PDI-P, Golkar, NasDem, Gerindra, PKS, PKB, PPP, Hanura, dan PAN.	76,96 persen
2	Kotak Kosong	-	23,04 persen

Sumber: data diolah dari berbagai sumber.

Seperti yang tampak pada data di atas, pada Pilkada 2013 pasangan Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi memperoleh suara sebesar 60,55 persen. Hal ini tentunya karena rekam jejak dan modal yang dimiliki oleh keluarga politik, termasuk telah didukung oleh partai menengah ke atas, seperti Demokrat, PDI-P, Hanura, Gerindra, PPP, PKS, dan PKNU. Namun, Partai Golkar, sebagai partai politik yang sudah memiliki historis politik besar ini justru mendukung Amir Hamzah yang dulu pernah menjadi wakil bupati bersama Mulyadi Jayabaya. Bahkan, Tomsa mengatakan Golkar adalah satu-satunya partai politik dengan kehadiran mapan di tingkat lokal di seluruh Nusantara (Tomsa, 2008). Kemudian, pada Pilkada 2018, Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi kembali maju dalam kontestasi elektoral ini.

Pada saat yang sama, Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi didukung oleh seluruh partai politik, termasuk Partai Golkar, yang pada Pilkada sebelumnya mendukung kompetitor dari Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi. Alhasil, pasangan ini memperoleh capaian suara yang besar, yakni sebesar 76,97 persen. Secara faktual, petahana mencoba melokalisir konflik atau perlawanan politik dari berbagai kandidat, termasuk masyarakat sipil dan lazimnya petahana akan melakukan mekanisme ini agar kekuasaannya tetap bertahan. Artinya, skala dan teritorial politiknya akan semakin lebih luas. Akibatnya, petahana mendominasi arena politik

dalam kontestasi jabatan politik tertinggi dalam roda pemerintahan atau Dan Slater menyebutnya sebagai satu jebakan di antara empat jebakan yang akan ada dalam negara demokrasi baru ini sebagai otoritarianisme elektoral (Slater, 2021).

Sebelum petahana memperoleh dukungan seluruh partai politik pada Pilkada 2018 yang lalu, dinamika kandidat yang akan maju juga muncul dalam entitas partai politik yang mencoba mengusung kandidat lainnya. Dalam bahasa lain, kandidat-kandidat yang akan maju ini mencoba mencari dukungan dari partai politik. Dalam hal ini Partai Nasdem juga telah kedatangan berbagai kandidat, termasuk petahana. Dedi Jubaedi sebagai ketua umum DPC Partai Nasdem Lebak juga mengatakan bahwa ada sebanyak 7 orang yang sudah mengambil formulir pendaftaran, di antaranya, Sumawijaya, Cecep Sumarno, Ahmad Jajuli, Sanuji Pentamerta (Kabarbanten, 2017). Akan tetapi, sebagai petahana yang secara integral dari keluarga politik tentunya mencoba mendominasi kompetisi seperti yang telah diulas oleh Slater di atas.

Dominasi yang dilakukan tentunya melibatkan keluarga politik, agar petahana tetap menduduki posisinya saat ini selama periode mendatang. Komunikasi politik sangat intens dilakukan oleh petahana, termasuk keluarga politik. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Lili Sugiyanto bahwa yang membangun komunikasi politik adalah Mulyadi Jayabaya, yang bisa melalui pihak ketiga. Namun, menurutnya, *king maker* politiknya adalah Mulyadi Jayabaya (Lili Sugiyanto, wawancara personal, 18 April 2023). Hal ini terlihat saat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mencoba mengusung kandidat yang ada internal, yaitu Sanuji Pentamerta, sekaligus yang sudah mengambil formulir di Partai Nasdem. Awalnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah membangun koalisi dengan partai politik lainnya, seperti PKB, Gerindra, dan Nasdem. Pada dasarnya, prospek terakhir sesungguhnya dengan Partai Nasdem. Setelah komunikasi ini dilalui, justru ada instruksi dari pengurus partai di tingkat provinsi agar DPC PKS Lebak mendukung petahana kembali. Menurut Sugiyanto ini, internal partai mendukung petahana kembali karena partai politik lainnya

sudah bergabung dengan petahana dan tentunya PKS tidak mau berada berada di luar secara sendiri.

Hal serupa juga dikemukakan oleh ketua umum partai politik Nasdem Lebak, Dedi Jubaedi yang mengatakan bahwa dirinya tidak pernah membangun komunikasi politik secara eksklusif dengan Mulyadi Jayabaya maupun pihak ketiga. Pada saat yang sama, karena semula Partai Nasdem juga telah melakukan penjurangan antarkandidat, salah satunya petahana. Semula, partai ini juga akan membangun kongsi dengan PKS. Namun, karena adanya komunikasi politik yang dilakukan oleh Mulyadi Jayabaya ke pengurus partai yang ada di atas, akhirnya kongsi yang akan dilakukan oleh PKS dan Nasdem gagal. Sebagaimana yang telah terekam dari wawancara bersama ketua umum DPC Nasdem, yang mendedahkan bahwa sejak awal Mulyadi Jayabaya sudah mengetahui bahwa dirinya tidak akan mengusung petahana. Oleh karena itu, agar dapat mendapatkan rekomendasi dari Partai Nasdem, Mulyadi Jayabaya membangun komunikasi ke pengurus partai yang ada di atas (Dedi Jubaedi, wawancara personal, 17 April 2023). Dalam perspektif tersebut, terlihat secara eksplisit bahwa Mulyadi Jayabaya yang memiliki ikatan kekeluargaan dengan Iti Octavia Jayabaya melakukan komunikasi politik dengan pengurus partai yang berada di tingkatan atas atau pusat. Kendati demikian, Dedi Jubaedi tidak menyebutkan secara detail mengenai komunikasi politik tersebut. Sebab, sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal, keluarga politik tersebut sudah mengetahui kompas politik atau sikap dari Partai Nasdem. Pada akhirnya, petahana juga turut mengikuti seleksi di Partai Nasdem dan memperoleh tiket untuk berlaga dalam arena politik lokal.

Dalam bahasa lain, saat pasangan Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi ikut dalam seleksi di internal Partai Nasdem di satu sisi, dan komunikasi politik yang dilakukan oleh Mulyadi Jayabaya bisa mengakselerasi keputusan secara ekstensif. Sebab, dalam arena politik di Indonesia, keputusan yang bisa memberikan rekomendasi kepada kandidat yang akan berlaga dalam kontestasi adalah pengurus partai yang ada di pusat. Sehingga, hal ini mengakibatkan

otonomi partai politik di daerah tidak memiliki wewenang besar, hanya sekadar memberikan usulan dari bawah. Saat proses elektoral ini berjalan, partai politik atas dan menengah telah mendukung petahana dan tidak ada alternatif pilihan lainnya bagi partai-partai bawah untuk tidak mendukung petahana. Kedua entitas politik seperti PDI Perjuangan dan Partai Demokrat di tingkat lokal ini telah menjadi penguasa selama keluarga politik ini menjabat.

Keberadaan dukungan partai-partai besar ini berimplikasi pada perubahan peta politik. Oleh karena itu, saat partai-partai politik besar ini sudah membangun koalisi politik dalam mengusung dan mendukung petahana, dan yang tersisa hanya partai-partai kecil. Pada dasarnya, dalam kompetisi politik, tidak ada yang mau mengalami kekalahan: akhirnya, partai-partai politik ini bersifat rasional (Harits Hijrah Wicaksana, wawancara personal, 4 Mei 2023).

Pemilihan kepala daerah 2018 yang dilakukan secara serentak telah menimbulkan dinamika politik baru dalam panggung politik di Indonesia. Saat ini, dinamika politik tersebut kini bukan sekadar menciptakan pembahasan absennya partai politik dalam melakukan kaderisasi di internal partai politik, melainkan telah mengalami pergeseran pada kontrol batas yang dilakukan oleh petahana untuk dapat melaju kembali dalam kompetisi politik. Padahal, sebagai suatu entitas modern, partai politik seyogianya memiliki peranan yang signifikan dalam tata kelola politik domestik; salah satu mekanisme kontrol batas yang dilakukan oleh petahana adalah menciptakan suatu kompetisi yang semu.

Dalam bahasa lain, melakukan pembatasan kompetisi di ruang publik, seperti melakukan membangun koalisi besar pada kontestasi elektoral. Hal ini dilakukan, agar tidak ada kompetitor lainnya yang memperoleh dukungan dari partai politik sebagai pemegang kuasa atas rekomendasi dukungan, meskipun di sisi yang lain bisa melalui jalur perseorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara faktual, dinamika politik ini telah melanda berbagai daerah di Indonesia, salah satunya pemilihan kepala daerah 2018 di

Kabupaten Lebak, dimana petahana melakukan strategi politik agar memperoleh rekomendasi dari partai politik lainnya. Komunikasi politik yang telah dilakukan tentunya melalui pasangan petahana maupun oleh elite politik lainnya yang memiliki afilias politik maupun keluarga dalam membangun komunikasi politiknya.

Modalitas politik yang dimiliki petahana tentunya sangat tinggi, karena petahana memiliki berbagai jejaring sosial dan politik yang bisa digunakan, seperti jejaring birokrasi, relasi patron-klien, dan lain seterusnya. Sehingga, modal yang dimiliki petahana lazimnya sangatlah superior, sekaligus bisa mendapatkan dukungan dari keluarga politik lokal termasuk para tokoh agama, pemimpin organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi sosial, asosiasi pengusaha, dan lain sebagainya. Keberadaan modalitas ini membuat petahana semakin ajek dalam kontestasi politik, terlebih keluarga politik sudah membangun kekuatan politik sebelumnya dalam rangka mempertahankan kekuasaan politiknya.

Komunikasi politik yang telah dilakukan oleh petahana maupun anggota keluarga politik ini secara gradual telah berhasil membuat partai politik lainnya bergabung dalam satu kompas politik petahana, yaitu Koalisi Iti-Ade (KITA). Koalisi politik yang dibentuk oleh petahana terdiri dari PDI P, Partai Demokrat, Partai Nasdem, PKB, PKS, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PPP, dan Hanura. Dengan kata lain, partai politik sebagai peserta pilkada ini secara riil telah mendukung petahana. Akibatnya, tidak ada partai politik yang mendukung kandidat-kandidat lainnya. Hal ini mengafirmasi mengenai pembahasan partai politik pasca-Suharto cenderung non-ideologis, tidak berpusat pada rakyat, elitis, dan digerakkan oleh figur. Bahkan, ketidakmampuan partai politik untuk merespons permasalahan masyarakat memunculkan sentimen anti-partai dan sikap anti-politik (Choi, 2009; Tan, 2006).

Meminjam istilah Romli (2018), ada beberapa hal yang melatar belakangi terbentuknya poros pasangan calon tunggal dalam pilkada serentak ini. *Pertama*, keberadaan calon tunggal sebagai akibat dua pihak yang saling berkepentingan, yaitu petahana dan

partai politik. Ia menyebutkan, di satu sisi, misalnya, petahana sudah barang tentu akan mempertahankan *status quo* yang dimilikinya agar tetap berkuasa. Mekanisme yang dilakukan oleh petahana dalam konteks ini, menurut Romli, dengan melakukan aksi “borong partai”. Sedangkan, partai memiliki kepentingan agar tetap menang dalam proses demokrasi elektoral ini. Dan, mekanisme yang dilakukan oleh entitas politik ini yakni ikutserta mendukung pasangan calon yang sudah memiliki kekuatan besar, di luar elektabilitasnya yang sudah mentereng. *Kedua*, partai politik gagal melakukan kaderisasi. *Ketiga*, beratnya sejumlah persyaratan untuk menjadi kandidat. *Keempat*, pragmatisme partai politik, dan yang *kelima* terlalu besarnya “mahar” politik (Romli, 2018).

Sebelum pemilihan kepala daerah ini digelar, petahana juga turut mengikuti seleksi di partai politik, salah satunya di Partai Nasdem. Seleksi yang dilakukan oleh Partai Nasdem ini telah diikuti oleh bakal calon lainnya yang hendak maju sebagai kontestasi pilkada, salah satunya adalah Iti Octavia Jayabaya sebagai petahana. Keikutsertaan Iti Octavia Jayabaya dalam penjaringan politik di Partai Nasdem tentu memiliki rasionalitas politik, karena semula institusi partai ini akan membangun koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera. Karena, Sanuji Pentamarta sebagai bakal calon bupati sekaligus anggota dari PKS juga telah mengikuti serangkaian penjaringan di Partai Nasdem. Sehingga, agar rekomendasi yang diberikan oleh Partai Nasdem ini tidak diberikan kepada bakal calon lainnya, ia sebagai petahana turut dalam seleksi penjaringan ini, termasuk keikutsertaannya ini juga bisa merubah peta dan kondisi politik yang ada, terutama dalam membangun koalisi. Alhasil, keikutsertaan Iti Octavia Jayabaya dalam penjaringan tersebut telah menutup aksesibilitas bakal calon bupati lainnya.

Pada dasarnya, petahana juga telah menyadari bahwa Partai Nasdem di awal tidak akan mendukungnya. Dengan demikian, agar rekomendasi politiknya diberikan kepada petahana, Iti Octavia Jayabaya membangun komunikasi politik dan mengikuti penjaringan di Partai Nasdem. Sementara itu, agar Partai

Nasdem dapat memberikan rekomendasinya pada petahana, keluarga politik ini juga turut membangun komunikasi ke tingkatan struktur partai politik yang lebih tinggi; kecenderungan petahana dan keluarga politik membangun komunikasi ini dilakukan untuk memengaruhi keputusan partai dalam memberikan tiket politik kepada bakal calon bupati. Dalam konteks ini, petahana dan keluarga politik telah berhasil memperoleh dukungan dari Partai Nasdem, karena Mulyadi Jayabaya telah melobi pengurus partai yang ada di atas (Dedi Jubaedi, wawancara personal, 17 April 2023).

Kekuatan politik yang dimiliki oleh petahana di satu sisi, dan Mulyadi Jayabaya sebagai orang kuat lokal (*local strongmen*) di sisi yang lain telah menambah superioritas politik petahana. Sehingga, dalam proses elektoral ini pengaruhnya masih sangat tinggi. Sebab, Mulyadi Jayabaya juga aktif di berbagai institusi lainnya setelah tidak menjabat lagi sebagai bupati, seperti aktif di perusahaan-perusahaan yang dimilikinya, terlebih Mulyadi Jayabaya telah dikenal sebagai figur yang memiliki otoritas besar. Hal ini tidak bisa menyangkal oleh siapa pun, terlebih Mulyadi Jayabaya dikenal sebagai eks Jawara sekaligus pengikut dari Tb. Chasan Sohib (Arifin, 2013). Sebagai aktor yang bergerak di sektor usaha, ia memiliki kewajiban untuk mendukung puterinya yang akan maju kembali dalam kontestasi Pilkada 2018, sekaligus dalam rangka mempertahankan kekuasaan politiknya.

Kemudian, mayoritas partai politik besar di Indonesia dikendalikan oleh sejumlah mantan aparat, militer, pengusaha, dan berbagai macam operator politik Orde Baru, baik di tingkat nasional maupun lokal (Robison and Hadiz, 2004). Bahkan, Iti Octavia Jayabaya juga menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat Lebak dan ketua umum Partai Demokrat Banten, termasuk Ade Sumardi yang juga menjadi pimpinan di PDI P Lebak dan PDI P Banten. Keduanya, memiliki modalitas yang besar, sehingga mudah untuk melakukan komunikasi politik bersama partai politik lainnya, termasuk upaya komunikasi politik juga dari Mulyadi Jayabaya. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan koalisi partai politik ini tidak

bisa menyangkal dari keterlibatan figur Mulyadi Jayabaya sebagai orang kuat lokal. Pada akhirnya, partai politik menengah dan bawah tidak mempunyai alternatif lain, termasuk mengusung kandidat lainnya, karena semuanya sudah bergabung dan tidak ada pilihan lain, selain ikut dalam satu kompas politik koalisi. Partai-partai politik ini menyadari pula, jika partai politiknya tetap berada di luar koalisi akan ada konsekuensi yang bisa diterima. Oleh karena itu, partai politik pada Pilkada Lebak 2018 ini cenderung bersifat pragmatis, dan mengabaikan kompetisi politik dalam arena demokrasi.

Setelah memperoleh dukungan dari partai politik peserta pilkada, petahana mendaftarkan dirinya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak pada Rabu (10/1/2018). Kans politik Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi semakin kuat karena berbagai dukungan yang telah diperoleh, terutama dari partai politik, dan modal awal karena sebagai petahana yang sudah barang tentu memiliki legitimasi dari masyarakat dan bisa dijadikan sebagai personal branding untuk meningkatkan *trust* publik pada petahana. Sementara itu, karena partai politik sudah mengusung dan mendukung petahana, termasuk Partai Nasdem, bakal calon yang semula ikut penjurangan di partai Nasdem, seperti Cecep Sumarno harus menerima keputusan partai politik. Akhirnya, Cecep Sumarno maju melalui jalur perseorangan dan harus menerima secara empris dan perlu mengumpulkan berbagai persyaratan sesuai regulasi, terutama bukti dukungan dari masyarakat berbentuk identitas maupun surat keterangan. Namun, hal ini tidaklah mudah dilakukan, karena akan membutuhkan waktu dan biaya yang tinggi, terlebih akan dilakukan verifikasi oleh penyelenggara pemilu.

Dalam perspektif tersebut, kesimpulan pada pembahasan ini menampilkan uraian bahwa petahana mempertahankan kekuasaan politiknya melalui tiga mekanisme seperti yang telah diuraikan di awal, salah satunya melalui pemborongan partai politik. Secara umum, petahana memiliki kekuatan politik yang besar dalam kompetisi elektoral pada 2018 yang lalu, termasuk dalam aktivitas politik yang dilakukan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah ini sudah memiliki arena politik yang sudah tampil

sedari awal sebelum kontestasi politik. Petahana juga didukung oleh Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi) Lebak pada Pilkada Lebak 2018. Bahkan, secara eksklusif asosiasi pemerintahan desa ini mendeklarasikan dukungannya kepada petahana, termasuk kehadiran kepala desa dalam proses kehadirannya dalam masa kampanye dan camat yang memasang gambar petahana dalam kegiatan.

Kemudian, petahana juga menciptakan pola hubungan yang bersifat patronase dalam rangka mempertahankan *status quo* melalui anggota keluarga politik yang ada di berbagai lembaga; baik asosiasi pengusaha, anggota legislatif, maupun eksekutif, dalam ruang lingkup daerah dan nasional. Tak hanya itu, hubungan yang diciptakan dalam pola patronase ini juga dilakukan terhadap sejumlah organisasi, dimana memiliki kedekatan maupun masuk dalam struktural. Sehingga, hal ini membuat kekuatan politik keluarga politik ini, terutama petahana semakin kuat. Akibatnya, saat petahana berhasil melakukan *boundary closing* secara ekstensif, petahana menciptakan pembangunan koalisi secara besar atau disebut juga pemborongan partai pada Pilkada Lebak 2018 yang lalu yang mengakibatkan kompetisi politik bersifat semu.

***Boundary Opening* Barisan Juang Kotak Kosong dan *Boundary Closing* Petahana: Kegagalan Oposisi**

Semula, petahana dan keluarga politik sudah melakukan apa yang disebut Gibson sebagai "*boundary-closing*" (Gibson, 2013), karena untuk meminimalisir keterlibatan para pihak di luar wilayah teritorial yang keluarga politik lokal pimpin. Dalam bahasa lain, petahana melokalisir agar tidak terjadi konflik yang meluas yang melibatkan berbagai pihak. Sebelum petahana dan keluarga politik lokal membendung arus gerakan politik dari kelompok Barisan Juang Kotak Kosong (Bajukoko), kelompok ini juga melakukan upaya perluasan skala dan teritorial politik dengan mekanisme "*boundary-opening*", untuk mengajak aktor-aktor masyarakat lainnya dapat terlibat dalam gerakan politik yang juga bisa menambah unsur kekuatan politik dari kelompok ini. Para aktor masyarakat sipil

yang tergabung dalam Barisan Juang Kotak Kosong (Bajukoko) ini memperluas skala dan teritorial politiknya melalui pembangunan isu/klaim politik seperti ketidakadilan ekonomi, pembangunan, pelayanan yang tidak merata dan tidak maksimal, kesenjangan, kemiskinan, dan isu/klaim populis politik lainnya agar menyentuh dan memperoleh empati publik.

Dalam hal ini, ada beberapa argumentasi ihwal kegagalan gerakan politik dari kelompok Barisan Juang Kotak Kosong (Bajukoko) tidak memperoleh empati dari publik secara luas. Pertama, gerakan politik dari kelompok Barisan Juang Kotak Kosong (Bajukoko) gagal karena klaim/isu yang dikonstruksi ini tidak secara ekstensif menasar semua segmentasi pemilih. Kelompok ini hanya memiliki fokus di wilayah Lebak Selatan yang sekadar membangun klaim/isu ketidakadilan, tidak meratanya pembangunan, kemiskinan, kesenjangan dan lain sebagainya. Sedangkan, daerah-daerah administratif lainnya tidak dimobilisasi atau menjadi lokus dari perjuangan kelompok Barisan Juang Kotak Kosong (Bajukoko). Selain itu, klaim/isu politik terkait pemekaran atau daerah otonomi baru ini juga hanya berfokus pada daerah yang ada di Lebak Selatan dengan 10 kecamatan.

Pada saat yang sama, klaim/isu pemekaran wilayah ini juga tampaknya bersifat kontradiktif. Karena, Ade Sumardi sebagai wakil bupati juga menyetujui pembentukan pemekaran wilayah ini, terlebih ia dikenal sebagai sosok yang merepresentasikan masyarakat adat dan adat kasepuhan di Lebak atau lebih spesifik sebagai representasi masyarakat Lebak Selatan. Karena, ia sebagai putra daerah yang lahir di Lebak, terutama pernah mengenyam pendidikan di Citorek, yang sekaligus masuk ke salah satu Kecamatan Cibeber. Wilayah Cibeber, Lebak ini juga masuk salah satu daerah wacana pemekaran dan sudah barang tentu ia akan mendukung wacana politik ini. Ade Sumardi juga mengemukakan dirinya setuju akan adanya pemekaran wilayah, terlebih sebagai warga Lebak Selatan (Ade Sumardi, wawancara personal, 2 Mei 2023).

Gerakan politik masyarakat sipil ini berupaya melakukan "*boundary-opening*" agar

menciptakan kekuatan-kekuatan politik secara lokal dan memperluas pengaruhnya ke arena politik nasional (Gibson, 2013). Kegagalan kelompok Barisan Juang Kotak Kosong (Bajukoko) ini karena sejumlah faktor yang faktor yang menentukan yang memengaruhi kontestasi politik pada Pilkada Lebak 2018. Seperti, klaim/isu yang tidak maksimal yang dilakukan oleh kelompok ini, karena secara ruang lingkup terbatas pada satu wilayah tertentu. Padahal, secara letak geografis, Lebak memiliki 28 kecamatan. Namun, kelompok ini hanya membangun klaim/isu di satu segmentasi politik, yaitu wacana daerah otonomi baru. Sedangkan, daerah-daerah lainnya tidak tersentuh dalam perjuangan kelompok ini.

Kegagalan dalam kontestasi elektoral ini karena kelompok Barisan Juang Kotak Kosong (Bajukoko) tidak menciptakan aliansi yang kuat, termasuk dalam arena atau wilayah di Lebak Selatan yang menjadi basis perlawanan politiknya. Pada dasarnya, di wilayah Lebak Selatan terdapat masyarakat sipil lainnya yang bisa dilibatkan dalam proses membangun aliansi, seperti tokoh agama, ulama, petani, dan nelayan. Namun, hal ini tidak dilakukan oleh kelompok Barisan Juang Kotak Kosong (Bajukoko). Dan yang terakhir karena klaim/isu yang diciptakan juga terbatas dan aliansi yang tidak ada, termasuk tidak adanya konsensus. Hasilnya, tidak ada atensi dari para elite nasional untuk terlibat secara aktif dalam kompetisi elektoral pada Pilkada Lebak 2018.

SIMPULAN

Petahana telah berhasil memanfaatkan jejaring dan modalitas yang dimilikinya dalam menutup akses kompetitifnya sedari awal menjabat sebagai pemimpin daerah. Dalam hal ini, petahana juga melakukan upaya parokialisasi kekuasaan seperti birokrasi, misalnya, penulis menemukan adanya camat yang memasang foto pasangan calon pada kegiatan LPPDES di Kecamatan Banjarsari pada proses Pilkada Lebak 2018. Tak hanya itu, kepala desa juga dalam proses kampanye ditemukan bertemu dengan pasangan calon. Di samping itu, komunikasi politik petahana terhadap partai politik sebagai peserta

pemilu juga melibatkan Mulyadi Jayabaya sebagai orang kuat lokal (*local strongmen*) dalam menjalin sekaligus memiliki relasi yang baik terhadap partai politik agar memperoleh dukungan partai politik kepada petahana. Kemunculan gerakan politik masyarakat sipil yang tergabung dalam Barisan Juang Kotak Kosong (Bajukoko) dalam kontestasi elektoral di tingkat lokal ini di latar belakang oleh kondisi politik lokal yang didominasi oleh keluarga politik Mulyadi Jayabaya. Saat ini, kondisi politik lokal yang mudah dihegemoni oleh kekuatan politik keluarga ini membuat masyarakat sipil mengalami kejenuhan, karena tidak adanya perkembangan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan yang dapat mengisolasi berbagai perbedaan pembangunan, termasuk pelayanan publik. kekuasaannya dengan mekanisme parokialisasi kekuasaan, pemborongan partai politik, dan patronase. Sedangkan, di sisi yang lain, kelompok oposisi melakukan *boundary opening* untuk menarik atensi elite nasional dalam Pilkada 2018. kemunculan gerakan politik ini karena struktur peluang politik yang tertutup dan oposisi mengalami kegagalan. Sebab, strategi yang digunakan tidak dilakukan secara komprehensif, melainkan hanya ada di wilayah tertentu, tidak adanya kandidat demokratis yang didukung, hanya mendukung Kotak Kosong sebagai alat politik, dan gerakan Barisan Juang Kotak Kosong yang tidak bisa membawa kepentingan elite nasional ke daerah.

PUSTAKA ACUAN

- Arifin, S. (2013). *Perkembangan Oligarki di Provinsi Banten (2001-2012)*. Universitas Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Provinsi Banten Dalam Angka Banten Province in Figures 2017*. Serang: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Provinsi Banten Dalam Angka Banten Province in Figures 2018*. Serang: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
- Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. . (1992). *An Invitation to Reflexive Sociology* (Terj). Chicago: University of Chicago Press.

- Buehler, M., & Paige Tan. (2007). Party-Candidate Relationships in Indonesian Local Politics: A Case Study of the 2005 Regional Elections in Gowa, South Sulawesi Province. *Indonesia*, 84, 41–69.
- Choi, N. (2009). Democracy and patrimonial politics in local Indonesia. *Indonesia*, 88, 131-164.
- Detik.com. (2017). Bawa 72 Ribu KTP, Cecep Daftar Calon Independen Pilbup Lebak. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3749365/bawa-72-ribu-ktp-cecep-daftar-calon-independen-pilbup-lebak>
- Gibson, E. L. (2012). *Boundary Control Subnational: Authoritarianism in Federal Democracies*. New York: Cambridge University Press.
- Gibson, E. L. (2013). *Boundary Control: Subnational Authoritarianism in Federal Democracies*. New York, NY.: Cambridge University Press.
- Gunawan, E. (2017). Calon Perseorangan di Pilkada Lebak Serahkan Berkas ke KPU. diakses dari <https://titiknol.co.id/politik/calon-perseorangan-di-pilkada-lebak-serahkan-berkas-ke-kpu>
- Hadiz, V. R. (2022). *Lokalisasi Kekuasaan di Indonesia Pascaotoritarianisme*. Jakarta: PT Gramedia.
- Harriss, J., Stokke, K., & Tornquist, O. (2004). Introduction: The new local politics of democratisation. *Politicising Democracy*, 1–27. https://doi.org/https://doi.org/10.1057/9780230502802_1
- Jessica, T. (2011). “Evidence of a Local Incumbency Advantage.” *Legislative Studies Quarterly*, XXXVI(n° 2), 255–280.
- Joko J Prihatmoko. (2003). *Pemilu 2004 Dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP2I, LP3M Unwahas.
- Kabarbanten. (2017). Daftar Penjaringan Calon di Nasdem, Sumawijaya & Sanuji Maju di Pilkada Lebak. diakses dari <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/lebak/pr-59605208/daftar-penjaringan-calon-di-nasdem-sumawijaya-sanuji-maju-di-pilkada-lebak>
- Klinken, G. . (2009). Patronage Democracy in Provincial Indonesia. In O. Tornquist, N. Webster, & K. Stoke (Eds.), *Rethinking Popular Representation* (pp. 141–160). New York: Palgrave Macmillan.
- Mahar, C., Harker, R., & Wilkes, C. (2009). Posisi Teoritisasi Dasar. In S. Rahmana (Ed.), *(Habitus x Modal)+Ranah=Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: JALASUTRA.
- Mahpudin. (2021). Memilih Untuk Tidak Memilih: Protest Voting Dalam Pemilu Lokal Di Kabupaten Lebak, Banten. *Inovasi: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 18(2), 237–249.
- Mas’udi, W. (2017). *Creating Legitimacy in Decentralized Indonesia: Joko “Jokowi” Widodo’s Path to Legitimacy in Solo 2005-2012*. Melbourne: The University of Melbourne.
- Mierlo, T. van. (2021). Attrition as a bottom-up pathway to subnational democratization. *International Political Science Review*, 1–15. <https://doi.org/10.1177/01925121211019269>
- Nordholt, H. S., Klinken, G. van, & et al. (2007). *Renegotiating Boundaries: Local Politics in post-Suharto Indonesia*. Leiden: KITLV Press.
- Panwaslu. (2018). *Catatan Pengawasan Pilkada Kabupaten Lebak*. Kabupaten Lebak.
- Pratikno. (2007). Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Volume 10*.
- Robison, R., & Hadiz., V. R. (2004). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. London: RoutledgeCurzon.
- Romli, L. (2018). Pilkada Langsung, Calon Tunggal, Dan Masa Depan Demokrasi Lokal. *Jurnal Penelitian Politik*, 15.
- Simandjuntak, D. (2012). Gifts and Promises: Patronage Democracy in a Decentralised Indonesia. *European Journal of East Asian Stud*, 11(1), 99–126.

- Simanjuntak, D. (2010). *Who Shall be Raja? Patronage Democracy in North Sumatra, Indonesia*. University of Amsterdam.
- Slater, D. (2021). Keberhasilan dan Kelangsungan Demokrasi Indonesia yang Rapuh. In T. Power & E. Warburton (Eds.), *Demokrasi di Indonesia dari Stagnasi ke Regresi?* (p. 61). Jakarta: PT. Gramedia.
- Syamsul Hidayat, M., & Wardani, S. B. E. (2022). Politik Kekerabatan dan Praktik Klientelistik Keluarga Jayabaya di Lebak dan Keluarga Iskandar di Kabupaten Tangerang. *TheJournalish: Social and Government*, 3(2), 75–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.55314/tsg.v3i2.249>
- Tan, P. J. (2006). Indonesia seven years after Soeharto: party system institutionalization in a new democracy. *Journal Contemporary Asia*, 28(1), 88-114. <https://doi.org/10.1355/cs28-1e>
- Tomsa, D. (2008). *Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the Post-Suharto Era*. London: Routledge.
- Wawancara dengan Ade Sumardi, 2 Mei 2023.
- Wawancara dengan Dedi Jubaedi, 17 April 2023.
- Wawancara dengan Hakiki Hakim, 9 November 2022.
- Wawancara dengan Lili Sugiyanto, 18 April 2023.
- Wawancara dengan Ucuy Masyhuri Sajim, 2 Mei 2023.